

TESIS
PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBUATAN
KEBIJAKAN PERFILMAN INDONESIA
PADA MASA ORDE BARU DAN REFORMASI

Dosen Pembimbing :
DR. Hedi Pudjo Santosa, M.Si

Oleh :
Nama : Muhammad Bayu Widagdo
NIM : D4C008010
Konsentrasi : Kebijakan Media
Angkatan : I

PROGRAM MAGISTER ILMU KOMUNIKASI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2011

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBUATAN
KEBIJAKAN PERFILMAN INDONESIA
PADA MASA ORDE BARU DAN REFORMASI**

Disusun Oleh :

Nama: Muhammad Bayu Widagdo

NIM : D4C008010

**Tesis ini telah diujikan di depan Tim Penguji
pada tanggal 5 Januari 2011 dan dinyatakan lulus.**

Mengetahui,

Pembimbing

Ketua Program

Magister Ilmu Komunikasi

**Dr. Hedi Pudjo Santosa, M.Si
NIP. 19610510.198902.1.002**

**Dr. Sunarto
NIP. 9660727.199203.1.001**

ABSTRAKSI

Pergantian rejim kekuasaan pemerintahan acapkali diikuti perubahan sistem di berbagai lini bidang maupun kebijakan. Terlebih lagi kondisi masyarakat yang selalu berkembang menuntut diikutinya pula tata aturan dan sistem yang selaras dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Demikianlah selayaknya Pemerintah sebagai pemangku amanat rakyat membuat sistem perundangan yang tercermin dalam setiap kebijakan yang mendasarkan dan memperhatikan kebutuhan publik, dalam konteks ini perfilman nasional.

Peran Pemerintah dalam pembuatan kebijakan menjadi penting untuk dikaji secara mendalam berkaitan dengan bahwa setiap rezim Pemerintahan memiliki ideologi dan kepentingan untuk melanggengkan kekuasaan atas negara. Kebijakan adalah saah satu yang digunakan untuk itu. Penelitian ini menggunakan *Historical Comparative Research* yang berguna untuk menggali dan membandingkan kebijakan dalam bidang perfilman yang diambil oleh Pemerintah Orde Baru dan era Reformasi serta implementasi kebijakan tersebut, dan juga hal-hal yang melatar-belakangi munculnya kebijakan itu.

Pemerintahan Orde Baru sadar bahwa Film memiliki potensi baik positif maupun negatif dilihat dari sudut pandang kepentingan Orde Baru saat itu. Oleh karena kemampuan strategisnya tersebut sekaligus perlu diwaspadai dan dikontrol (bahkan dikriminalisasi) agar tidak mengganggu ketahanan kekuasaan Pemerintah saat itu. Film diposisikan sebagai piranti komunikasi *top down* Pemerintah kepada masyarakatnya. Di sisi lain kontrol Pemerintah Orde Baru terhadap perkembangan perfilman negeri yang terlalu ketat dirasa seperti pasung bagi perkembangan perfilman nasional.

Sementara itu era Reformasi bergulir selepas tumbangya Pemerintahan Orde Baru mendapati warisan berbagai macam persoalan perfilman yang telah bertahun-tahun bertumpuk dan siap memberontak dari pasungan (politik) Pemerintah. Oleh karena itu momen pergantian kekuasaan ini menjadi pemicu disegerakannya penggantian regulasi kebijakan perfilman yang sekian lama dirasa sudah tidak relevan lagi dengan konteks kemasyarakatan sekarang ini. Pemerintah era Reformasi mendapat dukungan sekaligus tuntutan untuk mendorong perfilman nasional ke arah yang lebih baik. Sementara itu industri perfilman dan idealisasi para kreator film belum menemukan titik temu.

Penelitian ini bertujuan untuk mendorong munculnya kesadaran kritis mengenai persoalan yang muncul di balik pembuatan kebijakan. hal apa yang melatar-belakangi munculnya kebijakan tersebut, serta implementasi logis dari kebijakan yang telah ditetapkan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin. Atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wata'ala kami dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul "Peran Pemerintah Dalam Pembuatan Kebijakan Perfilman Indonesia Pada Masa Orde Baru dan Reformasi". Tesis ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 2 pada Program Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang.

Kajian kebijakan media yang kami tekuni dan juga ketertarikan di bidang perfilman yang mendorong kami untuk meneliti secara mendalam kajian kebijakan perfilman di Indonesia. Selain itu, kajian kebijakan khususnya di bidang perfilman menurut penelusuran kami masih sangat jarang dan tesis ini semoga dapat memberikan kontribusi dalam bidang tersebut. Dengan metode *Historical Comparative Research* kami mengkaji peran Pemerintah pada masa Orde Baru dan Reformasi di balik kebijakan perfilman yang dibuat.

Kami menyadari sebagai manusia, tentu saja tesis ini jauh dari sempurna. Untuk itu, kritik membangun, saran konstruktif dan ide-ide cerdas yang belum masuk dalam hasil penelitian ini sangat kami harapkan. Penelitian ini bukanlah karya saya seorang, banyak pihak berperan di dalamnya. Untuk itu ijinilah saya berterimakasih yang tak terhingga kepada guru-guru saya; Mas Hedi Pudjo Santosa, Mas Turnomo Rahardjo, Mas Tandiyono Pradekso, Mas Sunarto, Mas Triyono Lukmantoro, Mas Yulianto, Mas Yanuar Luqman dan masih banyak lagi tanpa mengurangi rasa hormat terpaksa tidak mampu saya tuliskan satu per satu, yang dengan sabar meluangkan waktunya membimbing, mengajarkan saya banyak hal, serta berdiskusi. Juga Istri terkasih Nurina Dyah Larasaty yang dengan caranya sendiri dan sedemikian rupa menanti dan mendukung terselesaikannya tulisan ini. Teman-teman seangkatan Mikom I Pagi yang mau menyediakan diri menjadi media mengasah ide dan berdiskusi. Serta tak lupa kontribusi teman-teman pengelola Mikom Undip yang penuh pengertian dan bersahabat.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat menyumbangkan setetes pengetahuan kepada pembaca dan peneliti lain yang hendak meneliti kajian kebijakan media khususnya perfilman di Indonesia di masa mendatang, serta pihak lain yang membutuhkannya. Tabik.

Semarang, Januari 2011

Muhammad Bayu Widagdo

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	1
ABSTRAKSI	2
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL & GAMBAR	5
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang.....	7
B. Perumusan Masalah	16
C. Tujuan	16
D. Pembatasan Masalah	16
E. Signifikansi Penelitian	18
F. Kerangka Teori	19
1. Ideologi Dan Film.....	19
2. Hegemoni Dan Kekuasaan Dalam Film	22
3. Kebijakan Retrospektif Perfilman Indonesia	33
G. Sistematika Penulisan	34
H. Metode Penelitian	35
BAB II DI BALIK LAYAR PERFILMAN INDONESIA	40
I. Sinema Indonesia Dari Masa Ke Masa	41
J. Cita-Cita Tentang Sinema Indonesia	46
K. Badan Sensor Film	49
L. Kriteria Sensor	53
BAB III HARAPAN DAN KUNGKUNGAN KEBIJAKAN PERFILMAN DI ERA ORDE BARU DAN REFORMASI	57
A. Peraturan Pemerintah Di Bidang Perfilman Dari Penguasa Ke Penguasa	64
B. Melihat Bioskop Di Indonesia Dari Belakang Layar	73
BAB IV DILEMA KEBIJAKAN PERFILMAN INDONESIA PASCA ORDE BARU	75
A. Kebijakan Perfilman Nasional: Kepentingan Di Atas Kepentingan	76
B. Film Di Mata Pemerintah: Industri, Seni Atau Komunikasi Massa	81
C. Sensor, Hegemoni Dan Represi Pemerintah Atas Film, Dulu, Dan Kini	85
D. Ekspresi, Usaha, Dan Pengelolaan Film Dengan Kebijakan Perfilman Baru	87
E. Tarik Ulur Kepentingan Di Belakang Kebijakan Perfilman	90
F. Pemerintah Dan Aktor-Aktor Penentu Kebijakan: Negosiasi Tanpa Henti	96

BAB V	PENUTUP	140
	A. Kesimpulan	141
	B. Saran Dan Rekomendasi	146

DAFTAR TABEL & GAMBAR

Gambar 1.	Poster film “Penumpasan G 30 S PKI”	10
Gambar 2.	Poster film “Gie”	11
Gambar 3.	Poster film “Tjoet Nja’ Dhien”	25
Gambar 4.	Poster film “Janur Kuning”	45
Gambar 5.	Poster film “Janda Kembang”	60
Gambar 6.	Bioskop Megaria	61
Tabel 1.	Komparasi Kebijakan pada era Orde Baru dan Reformasi	99